



[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Tradisi Dan Transformasi Menelusuri Sejarah Perkembangan Ilmu Politik

Nadia Handayani¹, Ainun Zariah², M. Zilalul Qur'an Zein³

¹Universitas Mataram, Mataram, Nusa Tenggara Barat, nadiabima509080@gmail.com,

²Universitas Mataram, Mataram, Nusa Tenggara Barat, ainunzariah284@gmail.com,

³Universitas Mataram, Mataram, Nusa Tenggara Barat, muhammadzilal7@gmail.com

Abstrak: Ilmu politik secara sederhana dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang politik. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang sejarah perkembangan ilmu politik. Manfaat penelitian ini sebagai acuan akademis untuk memahami akar dan perkembangan ilmu politik. Penelitian ini menggunakan studi literatur. Pendekatan ini berfokus pada dinamika perkembangan ilmu politik dari masa ke masa. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa, ilmu politik telah berkembang dari pendekatan normatif pada masa klasik menuju pendekatan yang lebih empiris dan kaya akan perspektif multidisipliner di era kontemporer. Perjalanan ilmu politik sebagai disiplin keilmuan menunjukkan dinamika yang kompleks dan terus berkembang selaras dengan perubahan zaman.

Kata Kunci: *Politik, Sejarah, Studi literatur, Dinamika, Disiplin Ilmu.*

Abstract: Political science can be simply defined as the science that studies politics. The main objective of this study is to provide a comprehensive overview of the history of the development of political science. This study is useful as an academic reference for understanding the roots and development of political science. This study uses literature studies. This approach focuses on the dynamics of the development of political science from time to time. The results of this study indicate that political science has developed from a normative approach in classical times to a more empirical and rich in multidisciplinary perspectives in the contemporary era. The journey of political science as a scientific discipline shows complex dynamics and continues to develop in line with changing times.

Keywords: *Politics, History, Literature Method, Dynamics, Scientific Discipline.*

*Correspondence Address:	nadiabima509080@gmail.com
---------------------------------	--

Article History	Received	Revised	Published
	2 June 2025	2 June 2025	30 Maarch 2026

PENDAHULUAN | INTRODUCTION

Ilmu politik sebagai studi sistematis tentang kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan publik, telah mengalami perjalanan panjang dan kompleks sepanjang sejarah. Dari pemikiran para filsuf Yunani Kuno hingga teori-teori kontemporer yang kompleks, ilmu politik terus beradaptasi dan berevolusi seiring perubahan sosial, teknologi, dan ideologi. Plato (427–347 SM) dianggap sebagai tokoh utama dalam filsafat politik, sementara Aristoteles dianggap sebagai pelopor ilmu politik. Karya Aristoteles yang terkenal, “Politics,” sering dianggap sebagai awal dari perkembangan ilmu politik. Pemikiran tentang negara dan pemerintahan

dalam konteks Yunani Kuno dimulai sekitar tahun 450 SM, seperti yang terlihat dalam tulisan Plato dan Aristoteles. Keduanya memandang negara dari sudut pandang filosofis yang menganggap semua pengetahuan sebagai kesatuan yang utuh. Contohnya, Aristoteles melakukan studi terhadap berbagai konstitusi yang ada di kota-kota negara pada saat itu dan mengklasifikasikannya. Hal yang dilakukan Aristoteles ini kemudian dikenal sebagai studi perbandingan politik, salah satu aspek yang berkembang pesat dalam ilmu politik (Ummah 2021).

Memahami sejarah perkembangannya menjadi kunci untuk mengapresiasi kerumitan dan relevansi disiplin ilmu ini dalam menghadapi tantangan dunia modern. Perubahan tersebut tidak hanya tercermin dalam metode penelitian dan pendekatan teoritis, tetapi juga dalam objek kajiannya sendiri, seperti perkembangan negara-bangsa, sistem pemerintahan, dan isu-isu global yang semakin saling terkait. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang sejarah perkembangan ilmu politik menjadi amat penting. Kajian ini perlu menelusuri bagaimana tradisi-tradisi pemikiran klasik telah membentuk landasan ilmu politik modern, serta bagaimana transformasi-transformasi besar telah membentuk ulang pemahaman kita tentang politik. Hal ini mencakup analisis pengaruh berbagai faktor, seperti revolusi, perang, perkembangan teknologi, dan perubahan sosial budaya, terhadap evolusi pemikiran politik. Lebih lanjut, kajian ini juga perlu mempertimbangkan bagaimana perkembangan metode penelitian dan pendekatan teoritis telah membentuk perkembangan ilmu politik.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang sejarah perkembangan ilmu politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tradisi-tradisi pemikiran yang membentuk dasar ilmu politik modern, serta mengkaji transformasi-transformasi utama yang telah terjadi sepanjang sejarah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis pengaruh perkembangan metode penelitian dan pendekatan teoritis terhadap perkembangan ilmu politik, serta mengeksplorasi implikasi dari sejarah perkembangan ilmu politik bagi pemahaman politik kontemporer. Singkatnya, penelitian ini akan menelusuri perjalanan panjang ilmu politik, dari akar-akarnya di Yunani Kuno hingga perkembangannya di era modern. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif tentang sejarah dan perkembangan ilmu politik, serta relevansi disiplin ilmu ini dalam menghadapi tantangan dan peluang di masa depan.

METODE | METHOD

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk menggali dan menganalisis berbagai sumber yang ada mengenai tradisi dan transformasi: menelusuri sejarah perkembangan ilmu politik. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah menelusuri dan menganalisis dinamika perkembangan ilmu politik dari masa ke masa, mencakup aspek tradisi intelektual, perubahan paradigma, serta proses institusionalisasi sebagai disiplin ilmu. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap literatur primer dan sekunder, seperti karya-karya klasik ilmu politik, jurnal ilmiah, dan dokumen historis yang relevan.

Teknik analisis data dilakukan secara literatur dengan menitik beratkan pada interpretasi konteks sejarah, hubungan antar konsep, dan perubahan pemikiran politik dari masa klasik hingga kontemporer dan sumber dalam penulisan sejarah. Tinjauan literature merupakan suatu proses analisis yang berlangsung secara terus-menerus untuk menjawab pertanyaan teori dan metode sehingga dengan demikian, tinjauan literatur mampu memberikan ulasan kritis terhadap berbagai literatur dan penegasan tentang ciri khas penelitian yang hendak dikerjakan (Muhanum, 2021; Snyder, 2023).

Merujuk pada pandangan, maka pada hakekatnya aktivitas tinjauan literature bisa mendapat pemahaman lebih luas dari pengertian sebatas aktivitas membuat kajian dan ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku, dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori serta informasi baik masa lalu maupun saat ini, mengorganisasikan pustaka ke dalam topik dan dokumen yang dibutuhkan untuk proposal penelitian (Yam 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN | RESULTS AND DISCUSSION

1. Definisi Ilmu Politik

Ilmu politik yakni cabang ilmu sosial salah satunya terdapat landasan, kerangka, pusat perhatian, serta ruang lingkup yang nyata. Adapun bahwa masih belum tua karena lahir akhir abad ke 19. Adapun langkah tersebut bahwa ilmu politik tumbuh kembang dengan cepat yang dekat diantaranya sosiologi, antropologi, ekonomi, serta psikologi yang dapat saling mempengaruhi. Adapun dilihat dari sisi kerangka dengan skala luas, yakni bahasan rasional pada beberapa aspek negara serta kehidupan politik. Oleh sebab itu, ilmu politik dikatakan lebih jauh usianya dan ilmu sosial tertua di dunia.

Berdasarkan hakikatnya, politik merupakan bagian dari upaya manusia untuk mempertahankan terkait kehidupannya. Politik juga tidak dapat dipisahkan dari pelbagai aspek kehidupan baik dari sisi dasar ataupun sebaliknya. Setiap manusia pastinya melakukan hal yang sifatnya politik dan ada pada lingkungan yang disebut sistem politik. Ilmu politik mempelajari fenomena yang hidup dalam masyarakat adanya hal mendasar seperti interaksi sosial dan kehidupan masyarakat. Fenomena politik sebagai bagian dari kemasyarakatan. Artinya dapat dikatakan bahwa ada manusia, pasti ada fenomena politik (Ravyansyah 2022).

Ilmu politik pada dasarnya yakni sekelompok pengetahuan dari keseluruhan pengetahuan yang berturut-turut tetap. Sekelompok pengetahuan yang dimaksud yakni fenomena atau gejala dalam kehidupan kemasyarakatan. Ilmu politik mempelajari tentang fenomena atau gejala yang muncul dari sebab akibat manusia yang hidup bersama dalam kesatuan tertentu. Fenomena tersebut dari adanya perilaku orang dalam bentuk relasional. Perilaku yang dimaksud adalah adanya aktivitas politik (Political Acitivity). Oleh karena itu, apabila perilaku politik sudah menjadi pola, maka akan mengakibatkan adanya organisasi meliputi partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, serta negara. Ilmu Politik secara sederhana dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang politik. Plato dan Aristoteles menamakan politik sebagai *en dam onia atau the good life*. Penamaan ini memiliki maksud bahwa politik bertujuan untuk melindungi dan mencapai sebuah tujuan masyarakat yang sejahtera. Harold Lasswell dan David Easton merumuskan bahwa politik sebagai *The authoritative allocation of values for a society* atau alokasi nilai-nilai secara otoritatif, berdasarkan kewenangan, dan untuk sebuah masyarakat.

Sebagai sebuah ilmu, politik mempunyai subjek, objek, terminologi, teori, ciri, dan metodologi, serta diterima secara universal, yaitu dapat diajarkan dan dipelajari banyak orang. Politik dikatakan sebagai sebuah seni karena politik itu luhur, politik adalah cara memperjuangkan kepentingan bersama melalui negara, di samping itu politik juga merupakan seni untuk perubahan dan transformasi dalam sebuah negara demokrasi yang damai.

Agar kita dapat lebih memahami apa itu politik dan mempunyai pandangan yang lebih objektif tentang politik, maka ada baiknya jika kita nselihat berbagai definisi tentang politik dan ilmu politik yang dikemukakan oleh para pakar politik dunia. Namun perlu diketahui, bahwa berbeda dengan ilmu-ilmu pasti, ilmu politik sebagai bagian dari ilmu-ilmu sosial memiliki sebuah dinamika tersendiri, di mana setiap ilmuwan yang mendefinisikan ilmu politik mempunyai berbagai pendefinisian yang berbeda namun tetap dapat diambil benang merahnya. Teknik analisis data dilakukan secara literatur dengan menitik beratkan pada interpretasi konteks sejarah, hubungan antar konsep, dan perubahan pemikiran politik dari masa klasik hingga kontemporer dan sumber dalam penulisan sejarah. Tinjauan literature merupakan suatu proses analisis yang berlangsung secara terus- menerus untuk menjawab

pertanyaan teori dan metode sehingga dengan demikian, tinjauan literatur mampu memberikan ulasan kritis terhadap berbagai literatur dan penegasan tentang ciri khas penelitian yang hendak dikerjakan (Muhanum, 2021; Snyder, 2023).

Merujuk pada pandangan, maka pada hakekatnya aktivitas tinjauan literature bisa mendapat pemahaman lebih luas dari pengertian sebatas aktivitas membuat kajian dan ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku, dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori serta informasi baik masa lalu maupun saat ini, mengorganisasikan pustaka ke dalam topik dan dokumen yang dibutuhkan untuk proposal penelitian (Yam 2024).

1. Sejarah Dan Perkembangan Ilmu Politik

Pembahasan politik tidak dapat dilepaskan dari adanya peranan sebuah negara yang di dalamnya terdapat sekumpulan manusia yang saling bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan bersama, yaitu meraih kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera serta dapat tinggal dengan perasaan yang aman dan tentram. Terkait dengan hal tersebut maka terdapat pandangan seorang ilmuwan politik yang mengemukakan teori politik terkait dengan adanya kerja sama tersebut adalah Andrew Heywood "Politics is the activity through which a people make, preserve and amend the general rules under which they live and such is inextricably to the phenomenon of conflict and cooperation" (Politik adalah sebuah aktivitas yang mana sebuah bangsa membuat, mempertahankan, dan mengamandemen undang-undang yang mengatur kehidupan mereka, yang di mana aktivitas ini memiliki keterkaitan dengan fenomena konflik dan kerja sama).

Perbedaan perbedaan definisi dalam disiplin ilmu politik juga dikarenakan adanya cara pandang berbeda dari setiap ilmuwan yang diperoleh dari apa yang mereka rasakan dan teliti sendiri di lapangan, tetapi bukan berarti dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut membuat validitas keilmuan dari ilmu politik menjadi kabur atau bahkan menjadi tidak bermakna. Dengan sebuah verifikasi eksperimental maka konsep atau teori yang para pakar politik keluarkan tetap dapat dikatakan sebagai sebuah ilmu yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahan serta validitasnya.

Menurut Robert A. Dahi, ilmu politik adalah: "*Political science is, of course, the study of politics. One might better say, it is the systematic study of politics, that is an attempt by systematic analysis to discover in the confusing tangle of specific detail whatever principles may exist of wide and more general significance*". (ilmu politik adalah, tentu saja, studi dari politik. Seseorang mungkin dengan lebih baik mengatakan, ini adalah studi yang sistematis tentang

Dalam pandangan yang tidak jauh berbeda ilmu politik mempelajari tentang "*Political science, then is going to be study of the state, its aims and purposes, the institutions by which those are going to be realized, its relation with its individual members and with other states, and also what men have thought, said and written about all these questions.*" (ilmu politik, lalu, akan mempelajari negara, maksud dan tujuan-tujuannya, institusi dengan mana mereka akan menyadari, hubungannya dengan para anggota individunya dan dengan negara yang lain, dan juga apa yang orang telah perkirakan, sampingkan dan menulis tentang semua pertanyaan- pertanyaan ini).

J. Barents dalam lima Politik, mendefinisikan "ilmu politik sebagai Ilmu yang mempelajari kehidupan bermasyarakat dengan negara sebagai hagiannya; ilmu politik mempelajari negara dan bagaimana negara tersebut melakukan tugas serta fungsinya". Dari pendapat beberapa pemikir politik di atas terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan tentang apa itu Ilmu Politik. Ilmu Politik adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang negara dan bagaimana negara mengatur masyarakat serta mengadakan hubungan kerja sama dengan negara lain dalam rangka mencapai tujuan.

A. Sejarah Perkembangan Politik dan Ilmu Politik

1. Sejarah Perkembangan

Berbicara sejarah dan usia ilmu politik dapat dikatakan bahwa usia ilmu politik sudah sangat tua, aktivitas politik muncul seiring dengan berkembangnya kehidupan manusia sebab rangkaian aktivitas politik selalu melekat dalam setiap kehidupan manusia, sebagaimana halnya ketika manusia di dalam sebuah keluarga harus menentukan sosok kepala keluarga yang akan memimpin keluarga dengan kekuasaan dan kewenangannya. Ketika politik berada pada ruang lingkup kecil di keluarga maka terdapat kepala keluarga yang harus dapat memimpin keluarga dalam rangka mencapai sebuah tujuan keluarga yang harmonis dan sejahtera, serta mempunyai tanggung jawab untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi anggota keluarganya.

Dalam dimensi yang lebih luas, yaitu ketika ilmu politik tidak hanya berbicara masalah kekuasaan dan kewenangan di dalam keluarga tetapi juga sudah mulai masuk ke ranah negara atau wilayah kekuasaan pemerintah, maka kehidupan dalam ilmu politik dapat kita temukan ketika kerajaan-kerajaan di berbagai penjuru dunia mulai terbentuk. Terbentuknya kerajaan-kerajaan memberikan sebuah gambaran beberapa aktivitas politik, seperti bagaimana seorang raja diangkat oleh rakyatnya sehingga memiliki kekuasaan dan kewenangan di wilayahnya, kemudian bagaimana raja menjalankan kekuasaan dan kewenangannya untuk mencapai sebuah tujuan bersama.

Berdasarkan dari sejarah asal-mula kata "politik" berasal dari bahasa Yunani yaitu "Polis" yang artinya adalah negara kota pada zaman Yunani Kuno, di dalam polis hidup sekelompok individu (masyarakat) yang menurut Aristoteles adalah sebagai makhluk politik (zoon politicon)¹⁰, Sudah menjadi hakikat manusia hidup dalam polis, di mana hanya dalam polis manusia dapat memperoleh sifat moral yang paling tinggi, sebab di sinilah tempatnya urusan-urusan yang berkaitan dengan seluruh masyarakat akan dibicarakan.

Di dalam polis terdapat pemerintah yang memegang peranan penting dalam menjalankan kekuasaan di mana kekuasaan yang dipegang bertujuan untuk menciptakan sebuah ketertiban, membawa masyarakat kepada sebuah cita-cita bersama, yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera, pemerintah di sisi lain juga mempunyai tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari segala macam ancaman, dengan kata lain pemerintah menjalankan fungsi keamanan dan pertahanan bagi seluruh warga kota yang ada di dalamnya

Ilmu politik merupakan bagian dari ilmu sosial yang terus berkembang beriringan dengan perkembangan manusia sebagai makhluk sosial dan politik (zoon politicon). Oleh karena itu, memahami sejarah perkembangan ilmu politik tidak hanya berhenti ketika kita telah mengetahui bagaimana politik pada masa kerajaan-kerajaan dan Yunani Kuno, tetapi kita juga harus mengetahui bagaimana ilmu politik mempelajari proses terbentuknya bangsa dan negara beserta aktivitas-aktivitas yang kemudian berlangsung di dalamnya.

2. Sejarah Perkembangan Ilmu Politik di Indonesia

Perkembangan ilmu politik di Indonesia dapat ditelaah dari munculnya kerajaan-kerajaan di nusantara, seperti Kerajaan Tarumanagara di Jawa Barat yang bercorak Hindhu-Buddha (abad ke-4 hingga abad ke-7), Kerajaan Sriwijaya di Sumatera yang berkembang pesat pada abad ke-7 hingga abad ke-14, serta Kerajaan Majapahit di Jawa Timur (abad ke-14), maka perkembangan usia politik di tanah air sudah sangat tua bahkan jauh lebih tua dari usia kemerdekaan Negara Republik Indonesia.

Ilmu politik melihat dan menganalisis bagaimana keberadaan kerajaan-kerajaan di nusantara tersebut menggambarkan cerminan sebuah polis seperti yang terdapat di Yunani, di mana di dalamnya terdapat penguasa (pemerintah), masyarakat, dan wilayah dengan batas-batas tertentu. Ilmu politik mempelajari bagaimana kekuasaan dijalankan oleh raja selaku pemimpin untuk mengatur masyarakat dalam rangka menciptakan kondisi tertib dan melakukan usaha dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Di beberapa negara maju, seperti Inggris, Amerika Serikat, Belanda, dan negara lainnya ilmu politik telah berkembang dengan begitu pesat sehingga telah dilakukan beberapa penelitian oleh para ilmuwan untuk dapat mengembangkan disiplin ilmu politik. Hal tersebut terbukti dengan adanya beberapa pendekatan yang berbeda dalam disiplin ilmu politik.

Di Indonesia sendiri, disiplin ilmu politik sudah mulai banyak mendapat perhatian dari masyarakat dan dalam perkembangannya berusaha untuk menganalisis fenomena politik, baik secara nasional maupun internasional. Khusus pada era reformasi saat ini ilmu politik menjadi sebuah disiplin ilmu yang penting untuk dipelajari di beberapa perguruan tinggi karena menyangkut banyak aspek dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. Politik Luar Negeri Indonesia Masa Pasca Reformasi

Sejarah perkembangan politik luar negeri Indonesia menurut Mila, Vida, and Adi:2020 masa pasca reformasi dimulai pada saat masa pemerintahan B. J. Habibie, beberapa kebijakan dalam pemerintahannya yang membedakan dengan masa sebelum reformasi yaitu memberikan dukungan terhadap kebebasan pers, liberalisasi partai-partai politik, meningkatkan dan melanjutkan kerja sama bersama organisasi yang bersifat multilateral. Dilanjut, dengan masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, kebijakan politik luar negeri yang dilakukan sering kali menjadi sorotan publik hingga munculnya kritikan. Seperti, kunjungan ke lima benua, kritikan muncul dari ketua MPR Amin Rais dan ketua DPR Akbar Tandjung karena dirasa kurang memperhatikan masalah domestik, seperti konflik Aceh. Namun Gus Dur menjawab bahwa kunjungannya ke luar negeri bertujuan untuk mengembalikan nama baik Indonesia, berharap investor internasional menanamkan modal lagi, dan mencari dukungan internasional terhadap keutuhan Aceh yang merupakan bagian dari NKRI. Berbeda dengan masa Gus Dur, yang mana peran presiden lebih dominan dalam pelaksanaan politik luar negeri. Megawati lebih banyak melimpahkan tugas diplomasi dan tugas menjalankan politik luar negeri kepada menteri luar negerinya.

Dalam pelaksanaan politik luar negerinya, ia memprioritaskan dan memegang teguh prinsip yang selama ini dipegang dalam melaksanakan politik luar negeri yakni prinsip bebas aktif, mengembalikan martabat bangsa dan negara di mata dunia, serta mengembalikan kepercayaan luar negeri terhadap Indonesia termasuk lembaga-lembaga pemberi pinjaman kepada Indonesia dan investor terhadap kegiatan pemerintah. Selanjutnya, masa pemerintahan SBY dalam pelaksanaan politik luar negeri. Presiden SBY memiliki sebuah incaran utama yaitu pada Lingkaran Konsentris II. Lingkaran Konsentris II mencakup negara-negara tetangga disebelah selatan (seperti: Australia, Timor Timur dan Selandia Baru) yang bergabung sebagai suatu kemitraan yang strategis. Dan selanjutnya pemerintahan Joko Widodo, politik luar negerinya diwarnai dengan kebijakan hati-hati.

Presiden Joko Widodo juga memilih kebijakan yang tidak kontroversial, karena akan mengakibatkan pada penolakan para anggota DPR. Oleh karena itu kebijakan yang digunakan adalah sebuah kebijakan yang dapat merebut hati para anggota DPR dengan kebijakan yang dapat memenangkan hati rakyat. Dengan hal tersebut akan mengurangi perhatian kepada masalah- masalah internasional dikarenakan pemerintahan Joko Widodo bersama para DPR lebih mengedepankan untuk kepentingan dalam negerinya dengan membuat program-program yang ditujukan kepada masyarakat.

Wilianto, Ari (2020) mengatakan bahwa setiap masa pemerintahan, presiden sebagai pemimpin negara sekaligus pemimpin pemerintahan berupaya semaksimal mungkin dalam membuat dan menyusun strategi dalam pelaksanaan politik luar negerinya. Perjuangan dalam menjalankan pemerintahan Indonesia akan terus berjalan. Pengalaman terhadap peristiwa reformasi yang terjadi di Indonesia membuat sadar dari berbagai pihak bahwa sangat diperlukan perbaikan di segala bidang, guna untuk mendapatkan respon yang cepat dan tepat dalam menjawab berbagai tantangan zaman. Mengingat setiap masa akan

mempunyai berbagai dinamika situasi domestik maupun global, begitupun dengan kebijakan di setiap masa tersebut. Penelitian ini pun perlu adanya penyempurnaan dari penelitian selanjutnya sehingga pembaharuan ilmu pengetahuan akan terus berlanjut.

B. Politik sebagai Fenomena dan Ilmu Pengetahuan

1. Politik sebagai Fenomena

Fenomena politik saat ini ditandai oleh dinamika yang kompleks dan beragam tantangan. Di Indonesia, politik pasca-Pemilu 2024 dan memasuki tahun 2025 menunjukkan polarisasi yang tajam, konsolidasi kekuatan elite, serta pengaruh oligarki dan dinasti politik yang semakin dominan. Revisi Undang-Undang Pemilu 2025 dengan ambang batas pencalonan presiden yang tinggi berpotensi mendorong kartelisasi partai dan menghambat pembentukan koalisi yang koheren secara ideologi (Nomor et al. 2025).

Selain itu, politik post-truth semakin marak, di mana emosi dan narasi yang dibentuk media sosial sering mengalahkan fakta, memperkeruh suasana politik. Hal ini dikarenakan dinasti politik dapat menyebabkan ketidak stabilan dalam dunia politik, karena dengan adanya dinasti politik maka tidak adanya regenerasi pemikiran- pemikiran dan tatanan mengenai struktur politik di Indonesia. Fenomena dinasti politik juga menjadi sorotan utama, dengan sekitar 65% kandidat Pilkada 2024 memiliki hubungan keluarga dengan penguasa sebelumnya, yang berdampak negatif pada demokrasi dan kesejahteraan rakyat (Parera 2023).

Disisi lain partisipasi masyarakat Indonesia dalam melaksanakan kegiatan politik belum sepenuhnya merata, masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang informasi atau penyelenggaraan politik yang dilakukan. Terutama informasi mengenai kandidat yang ikut mencalonkan diri menjadi wakil rakyat, hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya mengenai partisipasi gen Z dalam politik. Partisipasi gen Z meningkatkan informasi politik di masyarakat karena mereka aktif berinteraksi di media sosial yang merupakan sarana penyebaran informasi mengenai situasi politik yang akan dilaksanakan (Zaennurain, Azril, and Siltania 2025).

2. Politik sebagai Ilmu Pengetahuan

Sebagai sebuah aktivitas, kegiatan berpolitik memang sudah berlangsung seiring dengan perkembangan umat manusia sebagai makhluk politik, khususnya apabila kita melihat politik sebagai sebuah rangkaian kehidupan yang berkaitan dengan adanya kekuasaan, kewenangan, dan negara. Akan tetapi, sebagai sebuah disiplin ilmu maka ilmu politik dapat dikatakan baru, ketika beberapa pihak berpendapat bahwa politik tidak dapat dijadikan sebagai sebuah ilmu dikarenakan serangkaian aktivitasnya tidak bisa diuji atau dihipotesis melalui eksperimen yang dilakukan secara terkontrol dan terukur, lain halnya dengan ilmu-ilmu eksakta atau ilmu pasti yang pengujian hipotesisnya bisa dilakukan secara terukur.

Akan tetapi apabila tolak ukur di atas dimasukkan sebagai kriteria penentuan ilmu pengetahuan maka ilmu politik beserta ilmu-ilmu sosial lainnya akan sulit dikategorikan sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, beberapa sarjana ilmu politik pada 1948 melakukan pertemuan di Paris (Prancis) untuk memberikan perspektif baru tentang ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan didefinisikan sebagai "Keseluruhan pengetahuan yang terkoordinasi mengenai pokok pikiran tertentu. Syarat-syarat ilmu pengetahuan itu sendiri mencakup: rasional, empiris, akumulatif, teoretis, dan sistematis (Rasyid, Hamidi 2024).

Menurut pendapat Mulia 2024 terdapat beberapa manfaat dalam mempelajari ilmu politik antara lain sebagai berikut:

- a. Mengetahui arti penting sebuah negara dan bagaimana proses pembentukannya, dan lembaga-lembaga apa saja yang terdapat di dalam

negara, bagaimana pola pembagian kekuasaan di antara lembaga-lembaga tersebut, serta bagaimana bentuk negaranya dan sistem pemerintahannya.

- b. Memahami berbagai ideologi yang berkembang atau yang dianut oleh beberapa negara dan sekelompok masyarakat akan memperkaya khazanah keilmuan dan pengetahuan kita.
- c. Memahami makna dari demokrasi yang di dalamnya terdapat unsur bagaimana mengutamakan dan melindungi kepentingan rakyat serta menjalankan amanah rakyat, agar tercipta suatu kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.
- d. Memahami arti penting keberadaan partai politik dan pelaksanaan pemilihan umum dalam kehidupan bernegara yang juga merupakan cermin dalam kehidupan berdemokrasi.
- e. Mengetahui dan memahami proses globalisasi yang sedang berlangsung saat ini dan selanjutnya bagaimana kita memaknai itu dalam konteks kepentingan kita sebagai suatu bangsa.

C. Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya

Sebagai bagian dari disiplin ilmu sosial, keberadaan ilmu politik tidak dapat dilepaskan dari keberadaan ilmu-ilmu sosial lainnya. Di Eropa, seperti Jerman, Austria, dan Prancis sebelum berdiri sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri pokok bahasan Ilmu Politik masuk ke dalam Ilmu Negara yang merupakan bagian dari Fakultas Hukum, sebab politik pada saat itu masih dipersepsikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang negara, sedangkan di Inggris Ilmu Politik dianggap tidak dapat terlepas dari sejarah. Hingga kini pengaruh-pengaruh dari kedua ilmu tersebut terhadap ilmu politik masih tetap terasa, sebab bagaimana pun juga pembicaraan politik selalu akan membahas tentang negara dan sejarah kehidupan manusia.

Adapun pada zaman modern ini perkembangan ilmu politik juga terkait dengan perkembangan ilmu-ilmu sosial lain dan keterkaitannya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Filsafat

Filsafat adalah sebuah ilmu pengetahuan yang bertujuan mencari sebuah kebenaran. Oleh sebab itu, logika berfilsafat adalah logika yang berusaha secara rasional dan sistematis mencari pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan dalam kehidupan manusia serta alam semesta sampai kebenaran yang sesungguhnya dapat tercapai.

Keterkaitan filsafat dengan ilmu politik dapat dilihat dari filsafat yang selalu berusaha untuk mencari sebuah kebenaran dan kemudian dapat melahirkan berbagai nilai-nilai (value) yang bisa dijadikan pedoman oleh manusia sebagai zoon politicon, sebagaimana misalnya filsafat akan melihat apa sebenarnya yang menjadi nilai dan tujuan dari sebuah negara. Dengan adanya, filsafat maka sifat hakiki dari nilai serta tujuan negara akan muncul di mana negara dibentuk untuk melindungi dan menyejahterakan rakyatnya. Mengacu pada tujuan ini, maka akan mengarah juga pada bagaimana seharusnya pemerintahan dijalankan dan kekuasaan dimanfaatkan untuk kebaikan manusia.

2. Sejarah

Keterkaitan antara ilmu politik dengan sejarah dapat dilihat dari apa yang ditelaah oleh sejarah itu sendiri. Pada dasarnya sejarah memperhatikan data dan fakta dari masa lampau, ilmu politik menggunakan data dan fakta dari masa lampau untuk menemukan pola-pola ulangan yang dapat membantunya menentukan suatu proyeksi untuk masa depan. Dalam menganalisis data dan fakta dari masa lampau, ahli ilmu politik berusaha menemukan pola-pola tingkah laku politik untuk menyusun suatu masa depan yang diharapkan dapat berkembang. Pada pokoknya, politik dan sejarah dapat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.

Sejarah bagi para ahli dan sarjana ilmu politik juga dapat bermanfaat dalam menganalisis berbagai peristiwa politik yang memiliki kemiripan dengan peristiwa masa lalu untuk kemudian melakukan serangkaian tindakan pencegahan, seperti adanya sebuah kesamaan atau pola aktivitas berulang dari kegiatan komunis yang kemudian menuntut pemerintah demokratis untuk terus waspada akan bahaya tersebut. Contoh lain yang menunjukkan keterkaitan antara ilmu politik dengan sejarah adalah adanya penggambaran sebuah bentuk pemerintahan yang cenderung berulang, Polybios (204-122 SM) beranggapan bahwa lahirnya pemerintahan sebagai akibat dari pemerintahan sebelumnya yang telah ada.

3. Hukum

Antara ilmu hukum dengan ilmu politik memiliki keterkaitan yang sangat erat, alasan dari pernyataan ini setidaknya dapat dilihat dari pandangan Budiardjo (2009: 5) yang mengatakan bahwa aktivitas mengatur dan memaksakan undang-undang (law enforcement) merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Negara membuat undang-undang dan melengkapinya dengan keberadaan alat penegak hukum dalam rangka menciptakan ketertiban dan kepatuhan hukum warga negaranya, tanpa adanya ketertiban dan kepatuhan warga negara terhadap hukum maka negara akan sulit mencapai tujuannya. Tidak hanya itu, tanpa adanya hukum yang memaksa kepatuhan warga negara maka negara tidak akan memiliki kekuasaan.

Keterkaitan ilmu politik dengan ilmu hukum juga dapat dilihat dari sejarah perkembangan ilmu politik, dimana pada abad ke-18 dan ke-19 ilmu politik di Eropa seperti Jerman, Austria dan Prancis banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum karena fokus perhatian ilmu politik pada saat itu hanya negara semata,¹² Cabang-cabang ilmu hukum yang secara khusus mempelajari negara adalah hukum tata negara dan ilmu negara (Imawanto, Yanto, and Fahrurrozi 2021).

4. Sosiologi

Sosiologi dan ilmu politik adalah dua bagian dari ilmu sosial yang sama-sama mempelajari tentang manusia dan negara, sosiologi menyumbangkan pengertian akan adanya perubahan dalam masyarakat yang menempati sebuah negara tertentu. Selain mempelajari manusia-manusia sebagai sebuah masyarakat, sosiologi juga mempelajari negara sebagai sebuah asosiasi yang di dalamnya terdapat anggota asosiasi dengan berbagai latar belakang sifat, golongan, dan kegiatan yang juga dapat mempengaruhi sifat serta kegiatan negara.

Sosiologi membantu sarjana ilmu politik dalam usahanya memahami latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari pelbagai golongan serta kelompok dalam masyarakat. Dengan memanfaatkan konsep-konsep dalam sosiologi maka sarjana ilmu politik dapat mengetahui sejauh mana stratifikasi sosial di Masyarakat mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh keputusan kebijaksanaan, legitimasi politik, sumber-sumber kewenangan politik, pengendalian sosial, dan perubahan sosial.

5. Antropologi

Keterkaitan antara ilmu politik dengan antropologi dapat terlihat dari adanya sumbangan dari antropologi yang melahirkan pengertian-pengertian dan teori-teori tentang kedudukan serta peranan berbagai satuan sosial budaya. Dalam antropologi, kita mengetahui bahwa manusia itu beragam dan di antara keragaman tersebut terdapat satuan-satuan sosial budaya yang mempunyai karakteristik berbeda, adanya perbedaan karakteristik dalam satuan sosial budaya juga dapat berpengaruh terhadap pemikiran dan ideologi politik satuan sosial budaya tersebut.

Perhatian sarjana ilmu politik terhadap antropologi semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya perhatian dan penelitian tentang kehidupan serta usaha

modernisasi politik di negara-negara baru. Mula-mula penelitian politik terhadap beberapa negara baru berkisar pada masalah-masalah yang bersifat makro, namun antropologi menunjukkan bahwa betapa rumitnya mengelola kehidupan nasional pada level mikro (komunitas tradisional), khususnya ketika berhadapan dengan situasi faktor sosial budaya yang berlawanan dengan usaha-usaha nation building.

6. Ekonomi

Ilmu ekonomi merupakan suatu ilmu sosial yang sering digunakan untuk menyusun perhitungan-perhitungan ke depan, terutama berkaitan dengan usaha manusia untuk mengembangkan serta membagi sumber-sumber yang langka demi kelangsungan hidupnya. Studi ilmu ekonomi pada dasarnya bersifat planning-oriented dan choice-oriented. Planning oriented berpengaruh pada pengertian pembangunan politik, dan choice-oriented berpengaruh pada penelitian mengenai decision-making. Dalam membuat kebijakan ekonomi, seorang ahli ekonomi dapat bertanya kepada sarjana politik mengenai sistem politik manakah yang efektif untuk mencapai tujuan ekonomi.

7. Geografi

Ilmu geografi memiliki hubungan yang sangat erat dengan ilmu politik. Dalam keterkaitannya dengan ilmu politik, geografi menerangkan pengaruh fisik (misalnya letak, luas wilayah, dan kekayaan alam) atas pertumbuhan organisme politik. Kehidupan masyarakat di sebuah negara akan dipengaruhi oleh letak geografi, luas wilayah, kekayaan alam, iklim, dan sebagainya. Misalnya, letak geografis menentukan apakah suatu negara akan menjadi negara dengan basis kekuatan "land power" atau "se power", demikian juga lerak suatu negara akan mempengaruhi diplomasi dan strategi perang. Keterkaitan disiplin ilmu politik dengan ilmu geografi dapat terlihat dari adanya disiplin ilmu geopolitik dan geostrategis, Geopolitik berusaha melukiskan hubungan yang erat antara faktor-faktor geografis dan peristiwa politik.

KESIMPULAN | CONCLUSION

Perjalanan ilmu politik sebagai disiplin keilmuan menunjukkan dinamika yang kompleks dan terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Tradisi intelektual yang mengakar sejak era klasik, seperti pemikiran Plato dan Aristoteles, menjadi fondasi penting bagi perkembangan ilmu politik modern. Seiring waktu, ilmu politik mengalami transformasi paradigma yang signifikan, terutama pada masa Pencerahan, Revolusi Industri, dan era kontemporer yang ditandai dengan pendekatan multidisipliner dan metodologi ilmiah yang lebih sistematis. Proses institusionalisasi ilmu politik di berbagai universitas dan lembaga penelitian juga turut memperkuat kedudukannya sebagai bidang studi yang otonom dan relevan dalam menganalisis dinamika kekuasaan, kebijakan publik, serta relasi antara negara dan masyarakat. Oleh karena itu, memahami tradisi dan transformasi dalam sejarah perkembangan ilmu politik bukan hanya penting untuk mengenali akar keilmuannya, tetapi juga untuk merespons tantangan politik masa kini dengan pendekatan yang lebih reflektif dan kontekstual.

REFERENSI | REFERENCE

- Heywood, A. (2021). *Political Theory: An Introduction* (5th Ed.). Palgrave Macmillan.
- Hague, R., Harrop, M., & McCormick, J. (2019). *Comparative Government And Politics: An Introduction* (11th Ed.). Red Globe Press.
- Imawanto, Imawanto, Edi Yanto, And Fahrurrozi Fahrurrozi. 2021. "Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 12(1): 163. Doi:10.31764/Jmk.V12i1.2928.
- Mila, Nasihatul, Fatma Vida, And Depict Pristine Adi. 2020. "Indonesia Masa Pasca Reformasi."

Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 1 No.2(1): 73–100.

Mulia, Andi Achmad Munaszar. 2024. “Pendidikan Politik Dan Manfaat Peranannya Di Masyarakat.” *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 3(6): 515–32. Doi:10.58344/Locus.V3i6.2867.

Parera, Emilianus Indra. 2023. “Fenomena Politik Dinasti Sebagai Tantangan Bagi Sistem Demokrasi Di Indonesia.” *Ifik Ledalero* 7: 11376–86.

Rasyid, Hamidi, Dkk. 2024. Eureka Media Aksara *Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial*. [Http://Repo.Iain-Tulungagung.Ac.Id/5510/5/Bab 2.Pdf](Http://Repo.Iain-Tulungagung.Ac.Id/5510/5/Bab%202.Pdf).

Roskin, M. G. (2020). *Political Science: An Introduction* (14th Ed.). Pearson.

Siti Yuliana Novitasari, Ainun Najib, Prodi Ilmu, Hukum Fakultas, Ilmu Sosial, Dan Humaniora, Et Al. 2025. “Penegakan Hukum Pemilu Terhadap Praktik Politik Uang Di Indonesia Demokrasi . Dalam Konsep Demokrasi , Pemerintahan Suatu Negara Merupakan Pemerintahan Demokratis Ialah Terlaksananya Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilihan Umum Adalah Sarana Dalam Negara Kes.” : 369–81.

Safar, Muhammad. 2023. “Sejarah Perkembangan Politik Hukum Nasional.” 3.

Suryanto. 2016. 6 Intruns Publishing *Pengantar Ilmu Politik*.

Ummah, Masfi Sya'fiatul. 2019. 11 Sustainability (Switzerland) *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析title*.

[Http://Scioteca.Caf.Com/Bitstream/Handle/123456789/1091/Red2017-Eng-8ene.Pdf?Sequence=12&Isallowed=Y%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Regsciurbeco.2008.06.005%0ahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/305320484_Sistem Pembetulan](Http://Scioteca.Caf.Com/Bitstream/Handle/123456789/1091/Red2017-Eng-8ene.Pdf?Sequence=12&Isallowed=Y%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Regsciurbeco.2008.06.005%0ahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/305320484_Sistem_Pembetulan)

_Terpusat_Strategi_Melestari.

Yam, Jim Hoy. 2024. “Kajian Penelitian: Tinjauan Literatur Sebagai Metode Penelitian.” *Jurnal Empire* 4(1): 61–70.

Zaennurain, Khaeroniq, Nur Aulia Azril, And Maula Desti Siltania. 2025. “Strategi Penyelenggaraan Pemilu Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Gen Z 2024 (Studi Kasus Pada Kpu Kota Mataram).” 9(1): 277–85